



Kandidat Perempuan Masih Rendah

SEBANYAK 101 wilayah di Indonesia, dua di antaranya di DIY, akan melaksanakan pesta demokrasi daerah serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Dari 620 calon kepala

daerah, kurang dari 8 persennya adalah perempuan sehingga dinilai, Pilkada 2017 dominasi pria atau patriarkisme makin menguat.

Kepala Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATU-

● ke halaman 14

Kandidat Perempuan Masih

● Sambungan Hal 13

NAMA, Nunung Qomariyah mengatakan, struktur politik arus lelaki dalam Pilkada 2017 masih kuat. Hal itu bisa ditunjukkan dari minimnya calon kepala daerah perempuan. Dari 620 calon, hanya 45 atau 7,3 persennya adalah calon perempuan.

Yayasan SATUNAMA kemudian melakukan kajian komparatif Pilkada 2015 dan 2017. Hasilnya, patriarkisme atau dominasi pria dalam politik semakin menguat di Pilkada

2017. Kandidasi perempuan mengalami stagnasi.

"Calon perempuan dalam Pilkada 2017 sebesar 7,3 persen, nilai persentase itu sama dengan Pilkada 2015, sehingga posisi perempuan seolah stagnan," ujar Nunung, Kamis (9/2).

Ia menjelaskan, ada banyak faktor mengapa kandidat perempuan mengalami stagnasi, satu di antaranya perempuan masih menghadapi tantangan ganda dalam perpolitikan. Yakni, struktur politik patriarki yang berujung pada tidak diprioritaskannya perempuan dalam kandidasi, dan elitisme politik yang mengharuskan persaingan dengan modal

finansial, politik, serta sosial yang kuat.

"Kandidat perempuan yang maju dalam Pilkada 2015 dan 2017 didominasi oleh aktor dari kelompok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, yakni legislatif, petahana, pengusaha, dan birokrat," jelas Nunung.

Komisioner KPU DIY, Farid Bambang Siswanto membenarkan bila kandidat perempuan masih berasal dari elite politik. Calon perempuan biasanya berlatar belakang legislatif, kader partai, kerabat partai, dan petahana.

"Legislator masih menjadi pemasok utama calon kepala daerah perempuan. Jadi kalau

mau memperbanyak calon kepala daerah perempuan, ya ditambah saja legislator perempuan kita," tutur Farid.

Menurutnya, walaupun beberapa partai sudah banyak memiliki kader perempuan, hal itu tak lantas memuluskan langkah perempuan untuk maju sebagai kandidat kepala daerah. Partai cenderung melihat pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal.

"Partai hanya memilih calon yang memiliki peluang besar untuk terpilih. Sedangkan, banyak faktor yang menghambat, semisal soal tafsir agama yang lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin, dan banyak hal lain," ungkapnya. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005